

dengan cara memberikan sanksi yang sepadan, serta melaksanakan monitoring secara berkala dan konsisten atas pencatatan peristiwa atau transaksi keuangan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a) Peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, misalnya seperti tingkat kecanggihan teknologi, tingkat kompetensi pegawai, dampak intervensi, pengaruh psikologis dan lain sebagainya.
- b) Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas ruang lingkup populasi penelitian, misalnya menambahkan badan daerah, inspektorat serta jajaran sekretariat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Untuk SKPD*. Alfabeta.
- Ahmad Faishol. (2016). *Ahmad Faishol*. *I*(3), 205–212.
- Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, L. H. E. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, *20*(2), 8–17. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1097>
- Baldric Siregar. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)* (Cetakan Pe). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Banjar, B. K. (2015). *Apa Itu Opini Badan Pemeriksa Keuangan*. <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2015/06/03/opinibpk/>
- BPK. (n.d.). *IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER*. Retrieved June 2, 2021, from <https://www.bpk.go.id/ihps>
- BPK Jawa Barat. (n.d.). *LHP LKPD*. Retrieved July 14, 2021, from <https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3/>
- Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.
- Dariana dan, & Jonase Oktavia. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi Kasus pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bengkulu. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, *2*(1), 77–105. <https://ejournal.stiesyariah Bengkulu.ac.id/index.php/jas/article/view/132>
- Fikri, M. A., Inapty, B. A., & Martiningsih, R. S. P. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating. *M. Ali Fikri Biana Adha Inapty Rr. Sri Pancawati Martiningsih*, *53*(9), 1689–1699.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- I Made Hendrawan dan I Ketut Rasmini. (2021). Gayatri 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 31(2), 476–489.
- Idawati, W., & Eleonora, L. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan. *Equity*, 22(2), 153. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.1367>
- Jesica Prastiwi, N. P., & Mimba, N. P. S. H. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1178. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p14>
- Kabar Priangan. (2018). *BPK Temukan Keganjilan Keuangan Pemkot Tasik Rp 3,2 Miliar*. <https://www.google.com/amp/s/kabarpriangan.com/bpk-temukan-keganjilan-keuangan-pemkot-tasik-rp-32-miliar/%3Famp>
- Klik Anggaran. (2019). *Rp 4,2 M Temuan BPK 2018 Kota Tasikmalaya Wajib Dikembalikan*. <https://klikanggaran.com/anggaran/rp-42-m-temuan-bpk-2018-kota-tasikmalaya-wajib-dikembalikan.html>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); Terbaru). Penerbit Andi.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 874–890. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18282.2017>
- Munasyir. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Utara. *Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(4), 23–35.
- Nadir, R., & Hasyim, H. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (Studi Empiris Di Pemda Kabupaten Barru). *Akuntabel*, 14(1), 57. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1007>
- P, C. A. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Mamasa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 121. <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2260>
- Pilander, S. M., Saerang, D. P., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal*

- Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"*9(2), 128–139.  
<https://doi.org/10.35800/jjs.v9i2.26468>
- Putra, W. E. (2017). ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(2). <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i2.4259>
- Putu Cita Ayu, N. P. A. K. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 113–126.  
<https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v2i1.555>
- S Purnomo, B. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 276.  
<https://doi.org/10.17509/jrak.v2i1.6581>
- Satriawan, I., Rifa'i, A., & Yasin, M. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasional, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 4(1), 18. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v4i1.1879>
- Sihite, R. N., & Holiawati. (2017). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi & Investasi Aset (Akuntansi Riset)*, 9(2), 81–92.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Setiyami (ed.); Kedua). Alfabeta.
- Tuti Herawati. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR - Study & Accounting Reseaerch*, 11(1), 14.
- Udiyanti, N. L. N. A., Atmadja, T. A., & Darmawan, N. A. S. (2014). PEMERINTAH DAERAH ( Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng ) e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2.

#### **Peraturan-peraturan :**

- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016, (2016).
- Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2019). *Struktur Pemerintahan*. 2019.  
[https://www.portal.tasikmalayakota.go.id/index.php/q/struktur\\_pemerintah](https://www.portal.tasikmalayakota.go.id/index.php/q/struktur_pemerintah)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang

Pemerintahan Daerah, (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (2004).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, (2008).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019).